



**Strategi Komunikasi Pimpinan Meraih Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Kanwil Kemenkumham
Nusa Tenggara Barat**

*Leadership Communication Strategy Achieves Predicate of Region Free from
Corruption and Clean Bureaucratic Region and Serving the West Nusa
Tenggara Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights*

I Made Dody Sutrisna

Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, Indonesia

Email Korespondensi: kkdodik@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 17-04-2024

Revised : 19-04-2024

Accepted : 21-04-2024

Published : 23-04-2024

Abstract

The strategy of the leadership of the Office of the Ministry of Law and Human Rights, West Nusa Tenggara in an effort to achieve the title of Integrity Zone, Towards an Area Free from Corruption and a Clean and Serving Bureaucratic Area. The process of developing the Integrity Zone is a follow-up to the declaration of the Integrity Zone which is focused on implementing the Change Management, Management and Management program. HR Management, Strengthening Supervision, Strengthening Performance Accountability, and Concrete Improvement of Public Service Quality. Corruption Free Areas According to Ministerial Decree PAN-RB Number 52 of 2014 concerning Guidelines for Development of Integrity Zones Towards Corruption Free Areas and Clean and Serving Bureaucratic Areas within government agencies, Corruption Free Areas is a predicate given to a work unit that fulfills the majority of management changes, structuring management, structuring HR management systems, strengthening supervision, and strengthening performance accountability. and the Clean and Serving Bureaucratic Area is the Clean and Serving Bureaucratic Area, a predicate given to a work unit that fulfills most of the change management, governance arrangements, HR management system structuring, strengthening supervision, strengthening performance accountability, and strengthening the quality of public services. Based on the problems in this research, the researcher used a Qualitative Interpretative approach with data collection techniques in this research, namely using Observation, Interview and documentation methods, with the results of the research being the Form of Leadership Communication Strategy to Achieve the Predicate of a Corruption Free Area and a Clean Bureaucratic Area Serving the Regional Office The West Nusa Tenggara Ministry of Law and Human Rights is internal communication by carrying out socialization and education, launching the development of an Integrity Zone, forming an Integrity Zone team, monitoring and evaluation and external communication, namely publication and dissemination of information, public complaints, community involvement. The obstacles faced in obtaining an area free from corruption



and a clean bureaucratic area serving the West Nusa Tenggara Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights are unsupportive organizational culture, lack of resources, internal resistance, unclear rules and procedures and external pressure. Implementation of a Corruption Free Area and a Clean Bureaucratic Area Serving an Integrity Zone at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Nusa Tenggara, namely the Designation of an Integrity Zone, Signing of Commitments, Training and Development, Supervision and Evaluation, and Use of Technology.

Keywords: Integrity Zone, Corruption Free Area and Clean and Serving Bureaucratic Area

Abstrak

Strategi pimpinan Kantor Kementerian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Barat dalam upaya meraih predikat wilayah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Wilayah Bebas Korupsi Menurut Permen PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah, Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani merupakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif Interpretatif dengan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Metode Observasi, Wawancara, dan dokumentasi, dengan hasil penelitian yaitu Bentuk strategi Komunikasi Pimpinan Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat adalah komunikasi Internal dengan melaksanakan Sosialisasi dan edukasi, Pencanangan pembangunan Zona Integritas, Pembentukan tim Zona Integritas, Monitoring dan evaluasi dan Komunikasi Eksternal yaitu Publikasi dan diseminasi informasi, Pengaduan masyarakat, Keterlibatan masyarakat. Kendala yang dihadapi untuk memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat yaitu Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung, Kurangnya Sumber Daya, Resistensi dari Internal, Tidak jelas Aturan dan Prosedur dan Tekanan Eksternal. Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Zona Integritas Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat yaitu Pencanangan Zona Integritas, Penanda-tanganan Komitmen, Pelatihan dan Pengembangan, Pengawasan dan Evaluasi, dan Penggunaan Teknologi.

Kata Kunci: Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani.

PENDAHULUAN

Komunikasi diartikan pula sebagai proses mengirim dan menerima pesan, serta dikatakan efektif jika pesan tersebut dapat dimengerti dan menstimulasi tindakan atau mendorong orang lain



untuk bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan tersebut. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan *planning* dan manajemen *management* untuk mencapai suatu tujuan. Dalam mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Demikian pula dengan strategi komunikasi yang merupakan paduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Wilayah Bebas Korupsi Menurut Permen PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah, Wilayah Bebas dari Korupsi adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani merupakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik (Permen PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014). Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah di mana pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK WBBM.

Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan instansi tentang unit yang akan diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK WBBM maka langkah selanjutnya adalah penetapan. Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Barat berupaya Membangun Zona



Integritas Pada satuan kementerian Hukum dan Ham Nusa Tenggara Barat dengan berbagai upaya dan starategi yang telah ditetapkan.

Strategi pimpinan Kantor Kementerian Hukum Dan Ham Nusa Tenggara Barat dalam upaya meraih predikat wilayah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut penancangan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam membangun Zona Integritas, telah ditetapkan Satker yang diusulkan sebagai WBK dan WBBM. Proses pemilihan Satker yang berpotensi sebagai WBK/WBBM dilakukan dengan membentuk kelompok kerja tim untuk melakukan identifikasi terhadap Satker tersebut. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja tim mengusulkan kepada Kakanwil Kasatker untuk ditetapkan sebagai usulan Satker berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang Satker yang akan di usulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila Satker yang diusulkan memenuhi syarat sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, maka langkah selanjutnya adalah penetapan dengan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Zona Integritas Menuju WBK dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi penetapan sebagai Zona Integritas Menuju WBBM. Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditentukan dengan 2 komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen Pengungkit meliputi 6 program bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai komponen hasil.

Berdasarkan paparan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Strategi Komunikasi Pimpinan meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayanin (WBBM) Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif Interpretatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan apa adanya dalam bentuk kata-kata, gambar bukan angka, walaupun ada angka-angka sifatnya sebagai pendukung manakala ada yang kurang sempurna (Bungin,2001:58). Penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi



penelitian. Guna memperoleh data dan memudahkan penelitian, penulis akan mengambil informan dari Pimpinan Kepala Kantor, Unis-Unit yang berkaitan dengan Zona Integritas dan Sub yang berkaitan dengan pembangunan zona integritas di kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Strategi Komunikasi Pimpinan Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanin (WBBM) Pada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat

Komunikasi merupakan langkah awal untuk menyamakan pemahaman tentang istilah komunikasi ini. Secara etimologis komunikasi berasal dari bahasa latin communication atau communis yang berarti kesamaan makna tentang suatu hal. Sehingga komunikasi bisa diartikan juga sebagai proses sosial lebih dari satu orang yang saling berinteraksi dan memiliki kesamaan makna mengenai sesuatu hal. Proses komunikasi dapat diartikan sebuah transfer informasi atau pesan (message) dari pengertian pesan sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai komunikan. Dalam proses komunikasi untuk mencapai saling mengerti diantara dua komunikan (mutual understanding).

Dalam proses komunikasi komunikator mengirimkan sebuah pesan atau sebuah informasi kepada komunikan sebagai sasaran komunikasi. Hakikatnya komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa. Komunikasi secara keseluruhan memiliki kemampuan sebagai komunikasi yang ramah, bagaimana hubungan sosial individu dengan lingkungan umum, dan komunikasi juga merupakan media ekspresif dalam menyampaikan perasaan kita, perasaan ini disampaikan melalui bahasa nonverbal atau bahasa verbal yang kemudian menyampaikan sensasi dari komunikan. Susanto menyatakan bahwa ada lima konteks komunikasi, yaitu: komunikasi intrapersonal (intrapersonal communication), komunikasi antar personal (interpersonal communication), komunikasi kelompok (group communication), komunikasi organisasi (organizational communication) dan komunikasi massa (mass communication).

Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Komunikasi ini umumnya membahas proses pemahaman, ingatan dan interpretasi terhadap simbol yang ditangkap melalui panca indera. Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi terhadap diri sendiri, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antarpribadi merupakan proses dimana orang menciptakan dan mengelola hubungan mereka, melaksanakan tanggungjawab secara timbal balik dalam menciptakan makna. Lebih lanjut komunikasi antarpribadi merupakan rangkaian sistematis perilaku yang bertujuan yang terjadi dari waktu ke waktu dan berulang kali. Komunikasi perorangan yang dalam hal ini bersifat pribadi, baik secara langsung tanpa medium, atau pun langsung melalui medium.



Contoh percakapan tatap muka (face to face communication), percakapan melalui telepon, surat menyurat pribadi. Berdasarkan hasil data Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi berkaitan dengan Bentuk Strategi Komunikasi Pimpinan Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat dengan hasil penelitian sebagai berikut yaitu di dapatkan ada bentuk strategi komunikasi diantaranya menggunakan bentuk strategi komunikasi organisasi yang menekankan pada cara atau jalan yang ditetapkan oleh sebuah manajemen dalam organisasi untuk memaksimalkan proses komunikasi yang terjalin di dalam organisasi.

Selain itu, komunikasi organisasi juga bertujuan untuk memaksimalkan pencapaian visi dan misi organisasi karena di dalam proses komunikasi yang baik terdapat pencapaian yang baik pula. Bentuk strategi komunikasi organisasi yang dapat digunakan dalam rangka mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat: Yaitu komunikasi Internal dengan melaksanakan Sosialisasi dan edukasi, Pencanaan pembangunan Zona Integritas, Pembentukan tim Zona Integritas, Monitoring dan evaluasi dan Komunikasi Eksternal yaitu Publikasi dan diseminasi informasi, Pengaduan masyarakat, Keterlibatan masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi untuk memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian/Lembaga didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatas kemudian diperbaharui lagi dengan PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani meliputi 6 (enam) area pengungkit yang Harus dimana pemenuhan dan pembaharuan menjadi urat nadi keberhasilannya yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat telah menerapkan Zona Integritas sejak tahun 2014 dengan tujuan dari perencanaan tersebut yaitu agar prediksi korupsi, kolusi dan nepotisme tidak melekat pada Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat telah menerapkan Zona Integritas sejak tahun 2014 dengan tujuan dari perencanaan tersebut yaitu agar prediksi korupsi, kolusi dan nepotisme tidak melekat pada Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.



Pada tanggal 21 Desember 2020 Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM NTB meraih predikat WBK dari Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia. Dengan adanya penghargaan yang diterima oleh Kanwil Kementerian Hukum HAM NTB, diharapkan dapat menjadi motivasi atau acuan dari instansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Predikat Wilayah Bebas Korupsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan kualitas pelayanan publiknya karena sebagai bentuk citra instansi yang telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi. Hal ini pula dapat dijadikan area percontohan bagi satker-satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dalam penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya dalam mewujudkan lingkungan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat merupakan acuan bagi suatu negara dapat dikatakan baik termasuk di Indonesia sendiri. Oleh karena itu, pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan yang berkualitas. Sejalan dengan yang dikemukakan dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020 lalu. Berdasarkan paparan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan rumusan masalah kendala yang dihadapi untuk memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanin (WBBM) Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat yaitu di dapatkan hasil penelitian sebagai berikut diantaranya yaitu Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung, Kurangnya Sumber Daya, Resistensi dari Internal, Tidak jelasan Aturan dan Prosedur dan Tekanan Eksternal

3. Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanin (WBBM) Zona Integritas Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat

Adanya program pembangunan zona integritas dengan Peraturan awal yang di terbitkan pada tahun 2014 tertuang di dalam aturan Nomor 52 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang menjadi pedoman awal terhadap Pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang di peruntukan untuk lingkungan Instansi Pemerintah. Dan aturan Zona Integritas tersebut menjadi aturan turunan yang akan dijalankan terhadap implementasinya dari Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan terhadap Korupsi.

Kemudian, Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut kembali dievaluasi untuk dapat kembali meningkatkan kualitas pembangunan dan



pengelolaan Zona Integritas dan diperbaharui dari aturan yang sebelumnya terdapat dalam Permenpan Nomor 52 tahun 2014 tersebut dengan alasan yaitu karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu adanya perubahan aturan, adapun perbedaan perubahan tersebut terlihat dari mekanisme peraturan yang diperbaharui dengan adanya aturan tersebut yang mengatur lebih detail yaitu tertuang di dalam Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 dengan tujuan yang masih sama supaya dapat memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

Perubahan tersebut di cantumkan didalam aturan yang dapat dibedakan terhadap terbitan aturan lama yaitu dengan adanya sisipan pasal yang terdapat di dalam pasal 2 dan 3 diantaranya adalah pasal 2A dan 2B bertuliskan, bahwa: “Pasal 2A: Instansi pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah mendapatkan predikat Menuju (WBK) atau (WBBM) berdasarkan kebijakan internal di masing-masing instansi pemerintah.”

“Pasal 2B: Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.”

Implementasi suatu kebijakan merupakan suatu yang penting, merealisasikan suatu peraturan agar dapat berfungsi dan beroperasi sesuai dengan yang diinginkan dengan baik dan benar. Keberhasilan implementasi suatu peraturan sangat bergantung pada keberhasilan mengidentifikasi jejaring kerjasama antara perumus peraturan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran pemerintah terlebih instansi dalam penelitian ini Kemenkuham memegang posisi dan peran sangat penting seperti penguatan integritas dalam lingkungan kerja maka akan dapat meminimalisir adanya korupsi. Model Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn. Model ini adalah model yang sering ditemui dan yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”.

Beberapa variable yang mempengaruhi proses kebijakan dalam model implementasi ini yaitu: a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi. b) Karakteristik dan agen pelaksana /implementor. c) Kondisi ekonomi, sosial, politik, dan kecenderungan (disposition) dari pelaksana / implementor. Kebijakan sangat menuntut tersedianya sumber daya, baik dana maupun sumber daya lainnya. Kinerja suatu kebijakan agar terimplementasi dengan baik apabila factor-faktor, kewajiban, tanggung jawab dalam kebijakan telah terpenuhi, Faktor komunikasi merupakan hal yang dipandang rumit yang sangat potensial terjadinya penyimpangan komunikasi atau kesalah pahaman. Dalam instansi Kemenkuham, pimpinan atau atasan harus mampu mengkomunikasikan kebijakan yang terdapat pada pengaturan Zona Integritas(ZI) untuk menciptakan unit kerja dengan predikat Zona Integritas (ZI).

Berdasarkan hasil pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi berkaitan dengan Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih



Melayanin (WBBM) Zona Integritas Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat di dapatkan hasil sebagai berikut yaitu Pencanaan Zona Integritas, Penanda-tanganan Komitmen, Pelatihan dan Pengembangan, Pengawasan dan Evaluasi, dan Penggunaan Teknologi

KESIMPULAN

Strategi Komunikasi Pimpinan Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanin (WBBM) Pada Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat dengan hasil penelitian sebagai berikut yaitu di dapatkan ada bentuk strategi komunikasi diantaranya menggunakan bentuk strategi komunikasi organisasi yang menekankan pada cara atau jalan yang ditetapkan oleh sebuah manajemen dalam organisasi untuk memaksimalkan proses komunikasi yang terjalin di dalam organisasi. Kendala yang dihadapi untuk memperoleh Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanin (WBBM) Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung, Kurangnya Sumber Daya, Resistensi dari Internal, Tidak jelas Aturan dan Prosedur dan Tekanan Eksternal. Implementasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanin (WBBM) Zona Integritas Pada Kanwil Kemenkuham Nusa Tenggara Barat yaitu Pencanaan Zona Integritas, Penanda-tanganan Komitmen, Pelatihan dan Pengembangan, Pengawasan dan Evaluasi, dan Penggunaan Teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1987. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok : PT Raja Grafindo.
- Effendy. 2001. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- 2002. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Bandung : Remaja Rosdakarya..
- 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti..
- 2006. *Ilmu Komunikasi :Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Erliana Hasan. *Komunikasi Pemerintahan*(.Bandung: PT RefikaAditama, 2010)
- Gafar, T. Fahrul, et al. Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) Diindonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2022, 1.10: 2253-2264.
- H. Rocharat Harun, Ir., M.Ed., Ph.D. *Komunikasi Organisasi* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2008).
- H. Rocharat Harun, Ir., M.Ed., Ph.D. *Komunikasi Organisasi*,
- Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* edisi 1 cet.5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1998).
- Hafied Cangara, *Pengantar*, h.30. S. Djuarsa Sendjaja, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1994),
- Klau, Ferdinandus; KASE, Petrus; Daulay, Pardamean. *Strategi Peningkatan Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi*



- Manusia Nusa Tenggara Timur Dalam Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2022, 5.2: 941-948.
- Lynn H. Turner, Richard West. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Jilid 2 (Jakarta : Masalemba, 2008).
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moloeng, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Morissan, M.A, Teori Komunikasi Organisasi (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009)
- Mulyana, D. (2010). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Romi. Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Lembaga Pelayanan Pertanah. *Jurnal Pertanahan*, 2020, 6: 1-14.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- 2010. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Peneletian*. Bandung : Alfabeta.
- Rogers, Everett M., D. Lawrence Kincaid. 1981. *Communication Networks: Towarda New Paradigm for Research*.
- Prastowo, A. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Soehartono, Irawan. 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.
- 2012. *Metode Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutaryo. *Sosiologi Komunikasi* (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2005).
- Onong Uchjana Effendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- Wiryanto, Teori komunikasi Massa, (Jakarta: Grasindo, 2001).